

PERAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
PEMERINTAHAN DESA (BPMPD) MELALUI PROGRAM PENINGKATAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN DI KECAMATAN KUNDUR  
BARAT KABUPATEN KARIMUN  
(STUDI PADA DESA SAWANG LAUT DAN DESA GEMURUH)  
TAHUN 2013

Oleh : EDY KURNIADI

Dosen Pembimbing : Dr. MUCHID, S.Sos.,M.Phil

Email : [Edykurniadi\\_IP07@yahoo.co.id](mailto:Edykurniadi_IP07@yahoo.co.id) Telp : 085264238287  
Fisip Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Panam,  
Pekanbaru 28293

ABSTRAK

This study aimed to determine the issue of how Role of Community Empowerment and Village Government of National Unity (BPMPD and Unity) Karimun through Enhancement Program for Community Empowerment in Rural Areas in the District of West Kundur Karimun (Studies in Sawang Sea village and Gemuruh village). The method used in this study using qualitative research methods, data collection techniques through direct interviews to the informant.

The results of the study The Role of Rural Community Empowerment Board and the Government of National Unity ( BPMPD and Unity ) Karimun through Enhancement Program for Community Empowerment in Rural Areas in the District of West Kundur Karimun (Studies in Sawang Sea village and Rumbling village), which is to develop and empower local potential sources existing power that each delivered development efforts through empowerment, basically aimed at achieving changes in people's behavior in order to realize improved quality of life that includes many aspects, economic, social, cultural, ideological, political, and defense and security. This occurs due to the inhibiting factors in the development and management of potential areas, namely : Community empowerment has been done is not directional and are not caused by factors focus funding for development is still minimal. Minimal Human Resources, Facilities and Infrastructure inadequate, customs and culture that are so thick and social influence local politics .

**Keywords:** Roles, Policies, Empowerment and Development

**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Pembangunan bersifat nasional pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama diperuntukkan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang

berada di wilayah terpencil di Indonesia sesuai dengan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang juga sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat tentunya tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan yang merupakan permasalahan umum yang sudah merambah sejak dahulu, oleh karena itu dibutuhkan penanganan dan penanggulangan yang optimal secara terus-menerus terkordinir dan terkoordinasi. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Namun, pemberdayaan yang baik haruslah melihat kepada esensi dari permasalahan yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh masyarakat miskin pada umumnya, melihat apa yang dibutuhkan dan bagaimana upaya mengatasinya agar hal tersebut haruslah benar-benar menjadi permasalahan yang difokuskan, sehingga

upaya proses pemberdayaan dapat dilakukan secara matang dan dapat berjalan secara optimal. Dan hasilnya, pemberdayaan masyarakat serta tujuan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat dapat terwujud atau paling tidak mampu mengurangi beban permasalahan kemiskinan ke tingkat yang lebih baik.

Untuk menciptakan upaya kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa, pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa langsung tertuang dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor : 16 Tahun 2012 Bagian Ke-II Pasal 26 Tentang Tugas Unit Kerja Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD & KESBANG) Kabupaten Karimun.

Kabupaten Karimun merupakan salah satu yang termasuk dalam wilayah provinsi Kepulauan Riau, melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Kabupaten Karimun memiliki 9 Kecamatan induk, dari 32 Desa dan 22 Kelurahan, dan selanjutnya pada tahun 2012 Kabupaten Karimun menjadi 12 Kecamatan 29 Kelurahan dan 42 Desa dari hasil penambahan pemekaran. Kabupaten Karimun memiliki luas wilayah 7.984 km<sup>2</sup>, dengan luas daratan 1.524 km<sup>2</sup> dan luas lautan 6.460 km<sup>2</sup>. Kabupaten Karimun terdiri dari 198 pulau dengan diantaranya berpenghuni. Karimun memiliki jumlah penduduk sebanyak 212.561 jiwa.

**Tabel. 1.1**  
**Cakupan Wilayah Pemerintahan Kabupaten Karimun**

Tingkat Wilayah	Cakupan Wilayah		
	Tahun 2001	Tahun 2004	Tahun 2012
Kecamatan	8	9	12
Kelurahan	16	22	29
Desa	26	32	42

*Sumber : Arsip BPMPD dan Kesbang Kabupaten Karimun Tahun 2012*

**Tabel. 1.2**  
**Cakupan Kecamatan Wilayah Pemerintahan Kabupaten Karimun Tahun 2012**

Cakupan Wilayah Kecamatan		
Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
Kecamatan Karimun	4 Kelurahan	2 Desa
Kecamatan Meral	5 Kelurahan	-
Kecamatan Meral Barat	2 Kelurahan	5 Desa
Kecamatan Tebing	7 Kelurahan	-
Kecamatan Buru	2 Kelurahan	2 Desa
Kecamatan Durai	-	4 Desa
Kecamatan Moro	2 Kelurahan	5 Desa
Kecamatan Ungar	1 Kelurahan	3 Desa
Kecamatan Belat	1 Kelurahan	5 Desa
Kecamatan Kunder	3 Kelurahan	5 Desa
Kecamatan Kunder Utara	1 Kelurahan	7 Desa
Kecamatan Kunder Barat	1 Kelurahan	4 Desa

*Sumber : Arsip BPMPD dan Kesbang Kabupaten Karimun Tahun 2012*

**Tabel. 1.3**  
**Cakupan Wilayah Kecamatan Kunder Barat**

Tingkat Wilayah	Cakupan Wilayah		
	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah RW / RT	Jumlah Penduduk
Kecamatan Kunder Barat	4 Desa / 1 Kelurahan	44 / 106	17.578

*Sumber : Arsip Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Tahun 2012*

Kunder Barat adalah sebuah kecamatan yang berada didalam wilayah Kabupaten Karimun propinsi Kepulauan Riau. Kecamatan Kunder Barat terdiri dari 4 Desa (Desa Gemuruh, Desa Sawang Laut, Desa Sawang Selatan, Desa Kunder) dan 1 Kelurahan (Kelurahan Sawang) yang memiliki luas wilayah 133 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 17.578.

Disamping memiliki lahan yang subur, wilayah Kecamatan Kunder Barat ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah perkebunan dan perikanan serta peternakan. Wilayah Kecamatan Kunder Barat juga merupakan wilayah yang memiliki komoditi, antara lain : Perkebunan (Karet, Kelapa, Nenas,

Durian, Pisang, Rambutan, Sagu, Rumput Laut, Tanaman Pangan dan Sayur-sayuran), Perikanan dan Peternakan (Ikan, Udang, Sapi, Kambing, Ayam dan Itik). Namun semua hasil komoditi tersebut takkan mampu berkembang baik tanpa adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat dan terkhusus pemerintah setempat.

Desa Gemuruh dan Desa Sawang Laut merupakan bagian dari program Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa di Kabupaten Karimun. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD & KESBANG) Kabupaten Karimun

berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan tangguh serta menanamkan sifat mental berbudi luhur dan berakhlak mulia dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Harapan masyarakat Kabupaten Karimun nantinya dapat mengakses secara langsung dengan meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat suatu daerah yang tercermin dari ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan kemajuan pembangunan.

## 2. Telaah Pustaka

### 1. Kebijakan

Menurut Syaukani (2005 : 43), implementasi merupakan suatu rangkaian dalam rangka menghantar kebijakannya kepada masyarakat sehingga kebijaksanaan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Adapun rangkaian kegiatan tersebut mencakup :

- a. Persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan.
- b. Menyiapkan sumber daya guna dalam menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan serta penentuan penetapan siapa saja yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijaksanaan tersebut.
- c. Bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kokrit ke masyarakat.

Kemukakan oleh Hessel Nogi (2000 : 13) yang mengatakan tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan dapat direalisasikan.

Dengan demikian dapat juga diketahui bahwa menurut Nugroho

(2008,115) terdapat tiga kegiatan pokok dalam kebijakan publik yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan
- b. Implementasi Kebijakan
- c. Evaluasi Kebijakan

Selanjutnya Van meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2007 : 158) membagi proses implementasi kebijakan menjadi enam variabel yaitu :

1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
4. Karakteristik badan-badan pelaksana
5. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik
6. Kecendrungan pelaksana

### 2. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Noe Etal (dalam A.Usmara 2002 : 123) Pemberdayaan adalah pemberian tanggung jawab dan kewenangan terhadap pekerjaan untuk mengambil keputusan menyangkut semua pengembangan produk dan pengambilan keputusan.

Berkenaan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni (dalam Sulistiani Ambar Teguh, 2004 : 79) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian.

Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang

menaruh kepedulian sebagai pihak yang diberdayakan.

Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan menurut (Edi Suharto, 2006 : 58) yaitu :

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah dan kurang beruntung.
2. Pemberdayaan adalah proses dengan nama orang menjadi kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dalam mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian, serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan orang lain yang menjadai perhatiannya.
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

Lebih lanjut Korten dan Carner (dalam Harry Hikmat, 2001 : 96) mengemukakan tiga tema penting yang dianggap sangat menentukan bagi konsep perencanaan pembangunan yang berpusat pada rakyat yaitu, sebagai berikut :

1. Penekanan pada dukungan dan pembagunan usaha-usaha swadaya kaum miskin guna menangani kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
2. Kesadaran bahwa kandatipun sektor modern merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagian besar rumah tangga miskin.

3. Kebutuhan adanya kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal.

### 3. Komunikasi dan Koordinasi

Menurut Myers & Myers (dalam Hasan 2005:18) Komunikasi sebagai titik pusat kekuatan menyatukan sehingga terjadi koordinasi antara orang-orang yang akan bergerak pada suatu tindakan yang terorganisir.

Menurut Terry dan Rue (1992:213) Komunikasi dapat digolongkan dalam berbagai jenis, seperti (a) Komunikasi ke bawah dan ke atas (b) Komunikasi formal dan informal (c) Komunikasi lisan dan tertulis.

Sedangkan Menurut Hasan (2005:95) Komunikasi Pemerintahan adalah penyampaian ide, program dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara.

Menurut Pearce dan Robinson (dalam silalahi 2011:217) Koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit kedalam satu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama. Dan Menurut Jame D. Mooney (dalam Handyaningrat, 1992:117) mendefinisikan sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama)

Sedangkan menurut Handyaningrat (1992:117) cirri-ciri dari koordinasi adalah sebagai berikut :

- a) Tanggungjawab koordinasi terletak pada pimpinan
- b) Koordinasi adalah suatu usaha kerjaan
- c) Koordinasi adalah proses yang terus menerus (*continius process*)
- d) Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur
- e) Konsep kesatuan tindakan

Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama.

### 3. Rumusan Masalah

Merujuk pada kondisi yang terjadi, peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisa salah satu program pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Karimun. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD & KESBANG) Kabupaten Karimun dalam penyelenggaraan program pemberdayaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pada pelaksanaan program tersebut ?.

### 4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
- b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat pada pelaksanaan program tersebut.

#### b. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmiah yang bersifat akademis dan menjadi sumbangsih pemikiran bagi pihak lain yang nantinya akan melakukan penelitian serupa di waktu mendatang khususnya yang berkaitan tentang pemberdayaan masyarakat.

##### b. Manfaat Praktis.

Memberikan bahan berupa saran dan masukan kepada pemerintah Kabupaten Karimun mengenai masalah-masalah yang ditemukan tentang upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Karimun sebagai penentu kebijakan mengenai hal-hal prinsip yang mesti diperhatikan demi keberhasilan program-program selanjutnya dimasa yang akan datang.

## METODE PENELITIAN

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data sebagai landasan penyusunan penelitian, maka penulis melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. **Teknik *indepth interview* (wawancara mendalam)**, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dan berkompeten tentang permasalahan dalam penelitian ini guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan penelitian ini.
- b. **Teknik Dokumentasi**, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

### 2. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

##### 1) Data Primer

Data ini adalah data yang diperoleh langsung dari informan dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, adapun data tersebut yang menyangkut kriteria-kriteria untuk menjelaskan



permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD & KESBANG) di Kabupaten Karimun di Kabupaten Karimun yang langsung diperoleh melalui wawancara dengan narasumber sebagai *Key Informant* yang dianggap memiliki kemampuan dibidangnya dengan tujuan memperoleh data yang valid.

## 2) Data Sekunder

Data yang diperoleh berupa data yang sudah diolah dan diperoleh dari makalah, penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, koran, buku dan tulisan-tulisan diinternet. Selain itu data sekunder juga berupa dokumen-dokumen resmi yang dapat membantu peneliti melakukan penelitian ini.

### b. Sumber Data dan Informan Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan ciri-ciri, sifat dan karakteristik tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dan ikut terlibat dalam program BPMPD di Kabupaten Karimun.

## 3. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka deskriptif analisis yang disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan yang ada di lapangan berupa data dan informasi hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan lain sebagainya yang selanjutnya dianalisis dengan langkah sebagai berikut :

- a. Reduksi data, dengan melakukan klasifikasi data dan menentukan kategori-kategori data yang diperoleh dan menempatkan pada kategori masing-masing.
- b. Pengorganisasian terhadap data ke dalam kelompok tertentu, sehingga memberikan kemudahan dalam membaca dan memahaminya.
- c. Interpretasi secara mendalam dan tajam dengan berbagai sumber termasuk temuan-temuan di lapangan. Data yang diperoleh juga bisa dikembangkan dengan mengacu kepada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna untuk memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Melalui Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan. Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun (Studi pada Desa Sawang Laut dan Desa Gemuruh)

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu proses peningkatan kemampuan masyarakat untuk lebih sejahtera secara mandiri. Saat ini program pemberdayaan merupakan salah satu cara yang paling efektif sebagai bentuk upaya untuk memecahkan permasalahan kemiskinan, tanpa terkecuali di Indonesia dan khususnya Pemerintah di Kabupaten Karimun. Banyak hal dan upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi permasalahan kemiskinan dan ketertinggalan di Indonesia, namun pada umumnya upaya-upaya pendekatan dan pemberdayaan berupa program atau

proyek yang dilakukan oleh pemerintah tersebut selalu bersifat *top down* yang tidak tepat pada sasaran. Selain itu juga, hal tersebut terkesan hanya melaksanakan program saja atau proyek saja, sehingga tidak membuahkan hasil dari upaya pemecahan permasalahan kemiskinan melainkan semakin bertambahnya permasalahan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Pemberdayaan yang baik haruslah melihat kepada esensi dari permasalahan yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh masyarakat miskin pada umumnya, melihat apa yang dibutuhkan dan bagaimana upaya mengatasinya, agar hal tersebut haruslah benar-benar menjadi permasalahan yang difokuskan, sehingga upaya proses pemberdayaan dapat dilakukan secara matang dan dapat berjalan secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD & KESBANG) Kabupaten Karimun dalam upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Gemuruh dan Desa Sawang Laut Kecamatan Kundur Barat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja**

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.54 tahun 2010 tentang perubahan nomor 8 tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan dengan mengukur realisasi capaian-capaian target perencanaan yang telah ditetapkan melalui rencana strategis.

Adapun dalam pelaksanaan evaluasi rencana kerja ini memperhatikan beberapa unsur pokok lain, yaitu :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi
- b. Tujuan yang dikehendaki
- c. Sasaran-sasaran prioritas untuk mewujudkannya
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya
- e. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya, sebagai point dalam penyusunan perencanaan tahun selanjutnya
- f. Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan

### **2. Analisis Kinerja Pelayanan BPMPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2011 tentang Pembentukan dan Sasaran Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun dan Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD & KESBANG) Kabupaten Karimun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya,
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dimana Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD &



KESBANG) Kabupaten Karimun di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Karimun.

Ada beberapa hal yang menjadi kinerja SKPD dalam pemberdayaan masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa, antara lain :

- a. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan ekonomi masyarakat serta melaksanakan bimbingan teknologi tepat guna dalam proses pemanfaatan potensi sumber daya alam di desa.
- b. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan peranan kelembagaan dan pelatihan masyarakat.
- c. Mengolah data, pengolahan keuangan desa, menyusun merencanakan dan melaksanakan pengembangan pemerintahan desa.
- d. Mengumpulkan, mengolah data, merencanakan, melaksanakan dan memberi petunjuk serta bimbingan terhadap peningkatan fungsi dan peran kelembagaan masyarakat dan lembaga lainnya.
- e. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, pembinaan nilai-nilai sejarah kebangsaan dan pelaksanaan pembauran.
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik, kelembagaan politik dan pemantapan kewapadaan dini dan kerjasama intelejen kemanan.
- g. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi hubungan dengan organisasi masyarakat.

### **3. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPMPD**

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD & KESBANG) Kabupaten Karimun ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama :

1. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Pengusulan APBD demi mendukung pelaksanaan program
4. Revitalisasi Keberadaan Lembaga Perekonomian Desa

### **4. Menelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan usulan kegiatan Musrenbang yang terkait dengan usulan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD & KESBANG) Kabupaten Karimun ke dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah.

Dari hasil forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dilakukan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bagi setiap SKPD. Dalam keadaan banyaknya usulan masyarakat yang mendesak dan belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap Satuan Kerja Pemerintah

Daerah (SKPD) yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD. Sehingga rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENJA SKPD) yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap SKPD.

Musrenbang tahunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Forum SKPD berfungsi menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.

## **B. Kendala-kendala yang dihadapi BPMPD.**

### **1. Kendala Internal**

- a. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Karimun dalam menyediakan anggaran untuk mendukung program-program yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD & KESBANG) Kabupaten Karimun.
- b. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD & KESBANG) Kabupaten Karimun dalam mendukung keseluruhan program dibidang persatuan dan kesatuan bangsa dan pembangunan politik. Hal ini mengingat bahwa tugas, fungsi dan tanggungjawab pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa serta politik

juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

- c. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia yang mendukung upaya pembangunan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD & KESBANG) Kabupaten Karimun belum memadai.
- d. Koordinasi pembangunan yang dilaksanakan pada berbagai instansi terkait dalam kegiatan berdimensi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD & KESBANG) Kabupaten Karimun masih lemah dan masih terliat tumpang tindih program.
- e. Terbatasnya kapasitas pemerintah daerah ditunjukkan dari kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai bidang-bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus, minimnya penguasaan teknologi juga menjadi salah satu keterbatasan, mengingat penguasaan teknologi informasi menjadi prasyarat dasar bagi peningkatan pengetahuan dan efektifitas serta efisiensi kerja.
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran pemerintah daerah maupun pemerintahan desa yang belum optimal dan ruang perkantoran yang kurang memadai, padahal manfaat besar untuk menunjang kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan usia alat/barang, maka kualitasnya pun semakin menurun sehingga banyak dibutuhkan penggantian/pemeliharaan.

## 2. Kendala Eksternal

- a. Salah satu penyebab kegagalan kebijakan dan program dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dimana :

- Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa relative masih rendah.
- Kemampuan dan keterampilan pengurus lembaga kemasyarakatan belum merata pada seluruh anggota pengurus.
- Rendahnya motivasi masyarakat untuk diperankan sebagai lembaga kemasyarakatan
- Keberadaan lembaga perekonomian desa belum berfungsi secara maksimal
- Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) perangkat desa
- Masih kurangnya aparatur desa yang ahli/kompeten dibidangnya

- b. Basis data yang valid guna menunjang pengambilan keputusan masih lemah. Selain basis data yang masih lemah, aksesibilitas terhadap data juga sulit. Masyarakat masih sulit mengakses data dan informasi pembangunan yang pada akhirnya berdampak kepada distribusi

pembangunan yang tidak tepat sasaran dan minimnya partisipasi masyarakat untuk mendukung dan terlibat dalam pembangunan daerah.

- c. Maraknya kelembagaan sosial yang muncul dan berbasis adat dan suku, berpotensi memunculkan persoalan lain. Hal ini dikarenakan antara kelembagaan-kelembagaan sosial itu ada yang dibentuk dengan orientasi politis yang dikhawatirkan kemudian hari justru menjadi ancaman bagi kerukunan antar penduduk asli dan pendatang, antar etnis dan antar agama.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat serta taraf hidup masyarakat yang lebih baik, memandirikan masyarakat agar lebih sejahtera dan terlepas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu perlu adanya tindakan pemerintah pusat dan daerah dalam memberdayakan masyarakat menjadi lebih baik.

1. Peran pemerintah daerah Kabupaten Karimun Khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD & KESBANG) Kabupaten Karimun dalam Melaksanakan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun (Studi pada Desa Sawang Laut dan Desa Gemuruh) melalui :

- a. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD & KESBANG) Kabupaten Karimun. Hal ini dilakukan untuk mengukur realisasi capaian-capaian target perencanaan yang telah ditetapkan melalui rencana strategis agar terlaksana sesuai harapan.
  - b. Analisis Kinerja dan Pelayanan BPMPD, hal ini dilakukan sebagai upaya perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang dan tugasnya, selanjutnya sebagai pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
  - c. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPMPD, penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD & KESBANG) Kabupaten Karimun ini diarahkan untuk mendapatkan kinerja yang akurat dan konsisten mengenai capaian kinerja dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya, manfaat, efisiensi, keekonomian dan efektifitas serta tercapainya tujuan program.
  - d. Menelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjebatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain :
    - a. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Karimun dalam menyediakan anggaran untuk mendukung program-program yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD & KESBANG) Kabupaten Karimun.
    - b. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran pemerintah daerah maupun pemerintahan desa yang belum optimal dan ruang perkantoran yang kurang memadai, padahal manfaat besar untuk menunjang kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan usia alat/barang, maka kualitasnya pun semakin menurun sehingga banyak dibutuhkan penggantian/pemeliharaan.
    - c. Kendala Internal dan Eksternal : Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa relatif masih rendah, Kemampuan dan keterampilan lembaga kemasyarakatan belum merata, Rendahnya motivasi masyarakat sebagai lembaga kemasyarakatan, Keberadaan lembaga perekonomian desa belum berfungsi secara maksimal, Kurangnya SDM perangkat desa, Kurangnya aparatur desa yang ahli/kompeten dibidangnya.

## B. Saran

1. Peran pemerintah daerah Kabupaten Karimun Khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kesatuan Bangsa (BPMPD & KESBANG) Kabupaten Karimun dalam Melaksanakan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun (Studi pada Desa Sawang Laut dan Desa Gemuruh) perlu dioptimalkan lagi, baik itu dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, Anggaran dan Pembiayaan Program yang masih minim, Sarana dan Prasarana Pemerintahan yang kurang mendukung, serta Partisipasi Masyarakat yang cenderung masih rendah.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang panjang, perlu adanya pertemuan atau bimbingan rutin hingga masyarakat benar-benar paham dan mengerti dengan tujuan program. Keuletan, ketelitian, keseriusan dan kesabaran serta keprofesionalan adalah bagian dari faktor keberhasilan dalam proses program pemberdayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Adi, I.R. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Alwi, Hasan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anonim. 2010. *Kajian Sociolinguistik di Bayumas*.
- Ambar Teguh Sulistiyan (2004), *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media.
- Dunn, N. William, 2000. *Analisis Kebijakan Publik*, Gama Press, Yogyakarta.
- Fredian Tonny Nasdian, 2013. *Pengembangan Masyarakat*. Alfabet, Bandung.
- Gunawan Sumodiningrat, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakrta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Isbandi Rukminto Andi, 2003.
- GR Terry & Leslie W Rue, *Dasar - dasar Manajemen*. Press Risalah Bandung, Edisi Revisi 1992., Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Handayani, S. 1992. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta : Gunung Agung
- Hikmat, R. Harry, 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Revisi : Bandung, Humanira Utama Press
- Islamy, M. Irfan, 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Malayu S.P. Hasibuan, 1989. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Bumi Aksara. Yogyakarta.

- Makmur, Syarif, 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nogi, S. Hessel. 2000. *Analisis Kebijakan Publik Kontemporer*, Lukman Offset, Yogyakarta.
- Nugroho Riant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Oos M.Anwas, Haryono Suyono, 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Alfabeta, Bandung.
- Pranarka, A.M.W. dan Vidhayandika Moeljarto, 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Pranarka, Jakarta: Cides.
- Purnomo, Mangku, 2004. *Pembaharuan Desa*. Pustaka Yogya Mandiri, Yogyakarta
- Silalahi, Uber. 2011. *Azas - Azas Manajemen*, Reflika Aditama, Bandung
- Soeharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Sumaryadi Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. PT.Citra Utama, Jakarta.
- Sumadyo, Hadi, 2001. *Psikologi Sosial*. Bandung : Pustaka Setia
- Syaukani, Affan Gaffar, Ryass Rasyid. 2005. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Usmara. (2002). *Paradigma Baru Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jogjakarta: Asmara Books.
- Volume 2, 2009. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial (JIS)*. CV.Julang Ilmu, Pekanbaru.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Edisi Revisi), Media Pressindo : Yogyakarta.

#### **Karangan Ilmiah Yang Tidak Dipublikasikan :**

- Suharyanto, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PNPM-Mandiri Perkotaan (Studi Pada Masyarakat Di Kelurahan Batu Sembilan - Tanjungpinang) 2011*.
- Arniati, *Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Lubuk Mandi Gajah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan*.
- Idi Jahidi, *Analisis Kebijakan Publik Dalam Implementasi Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*.
- Adianto, *Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS) di Kota Pekanbaru*



### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang No. 32 Tahun 2004,  
Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 53 Tahun 1999,  
Tentang Pembentukan Kabupaten  
Karimun.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  
27 Tahun 2006, Tentang Penetapan dan  
Penegasan Batas Desa.

Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 30 Tahun 2006, Tentang Cara  
Penyerahan Urusan Pemerintah  
Kabupaten/Kota Kepada Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No.  
6 Tahun 2005, Tentang Rencana  
Pembangunan Jangka Panjang  
Kabupaten Karimun 2006-2025.

Keputusan Bupati Karimun Nomor. 82  
Tahun 2012, Tentang Rencana  
Strategis Satuan Kerja Perangkat  
Daerah di Lingkungan Pemerintah  
Daerah Kabupaten Karimun Tahun  
2011-2016.

Peraturan Bupati Karimun Nomor. 16  
Tahun 2012, Tentang Uraian  
Tugas Unit Kerja Pada Lembaga  
Teknis Daerah Kabupaten  
Karimun.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun  
Nomor 07 Tahun 2001 tentang  
Susunan Tata Kerja Pemerintah  
Desa.

Pemerintah Kabupaten Karimun :  
*Rencana Strategis (RENSTRA)*  
*Badan Pemberdayaan Masyarakat*  
*Pemerintahan Desa dan Kesatuan*  
*Bangsa (BPMPD & KESBANG)*

*Kabupaten Karimun Tahun 2011-  
2016.*

Pemerintah Kabupaten Karimun :  
*Laporan Akuntabilitas Kinerja*  
*Instansi Pemerintah (LAKIP)*  
*Badan Pemberdayaan Masyarakat*  
*Pemerintahan Desa dan Kesatuan*  
*Bangsa (BPMPD & KESBANG)*  
*Tahun 2011 dan 2013.*

### **Sumber Lain :**

<http://www.kab-karimun.go.id> Website  
Resmi Pemkab Karimun.

Tribun Batam, *Pemkab Karimun*  
*menambah anggaran program*  
*pengentasan kemiskinan melalui*  
*BPMPD*, Senin 14 November  
2011.

Haluan Kepri, *Anggaran BPMPD Naik*  
*dari 8% menjadi 11% ditahun*  
*2012*. Minggu 19 Februari 2012.